



KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA

NOTULEN RAPAT

Pembahasan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020

Topik: Implementasi Data Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownership) yang terintegrasi dan dapat diakses oleh publik.

1. Pelaksanaan

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 Agustus 2018

Waktu : 08.30-12.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat 204

2. Pimpinan Rapat : Tenaga Ahli Madya, Deputi II, Kantor Staf Presiden

3. Peserta Rapat :

1. Staf Ahli Bidang Kelembagaan, Kementerian PPN/ Bappenas
2. Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
4. Biro Perencanaan dan Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
5. Analis Hukum, Kementerian Hukum dan HAM
6. Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan HAM
7. Perencanaan dan Penganggaran, Kemenko Bidang Perekonomian
8. Satu Data Indonesia, Kantor Staf Presiden
9. Sekretariat EITI
10. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
11. Transparency International (TI) Indonesia
12. Sekretariat Open Government Indonesia

4. Pembahasan Rapat

1. Pertemuan bilateral hari ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Kick Off Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018.

2. Rencana aksi OGI berupaya untuk menajamkan RKP dan Renja K/L.
3. Tujuan dari renaksi ini adalah meningkatkan transparansi data penerima manfaat yang terintegrasi dan dapat diakses oleh publik, sesuai dengan ketentuan Perpres 13/2018. Pada renaksi ini komitmen lebih menysasar kepada system informasi korporasi dan publikasi data penerima manfaat sektor ekstraktif.
4. Komitmen pemerintah tentang BO juga terdapat dalam Stranas PK sesuai dengan amanat Perpres 54/2018. Perpres tersebut mengatur tentang komitmen untuk menguatkan basis data pelaku usaha pada berbagai sektor strategis di tingkat pusat maupun daerah.
5. Fokus komitmen BO pada Stranas PK adalah tersedianya Basis data BO (atau BO registry) untuk sektor ekstraktif dan kelapa sawit yang memadai, akurat, dan sesuai dengan keadaan terkini (updated).
6. Sedangkan aksi BO pada Renaksi OGI 2018-2020 berfokus kepada penerbitan peraturan turunan Perpres 13/2018 dan publikasi data BO pada sektor ekstraktif. Renaksi ini juga telah disesuaikan dengan Renaksi TPPU yang dirumuskan oleh PPATK.
7. Untuk menyederhanakan rencana aksi terkait BO dari berbagai pihak, perlu dilakukan integrasi agar tidak terlalu banyak laporan yang harus diinput oleh Kementerian/ Lembaga terkait
8. Update dari PPATK, tim dari PPATK sedang menyiapkan draft peraturan turunan Perpres 13/2018 untuk pendaftaran BO. Sudah ada draft Peraturan Menteri di 3 Kementerian, yakni: Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Perdagangan.
9. Terkait dengan sosialisasi pendaftaran BO, Sekrtariat EITI berencana melakukan ujicoba pengisian pelaporan BO untuk 112 perusahaan minerba dan 69 perusahaan migas.
10. Disamping itu, Kemenkumham juga telah menyiapkan rangkaian kegiatan untuk pelaksanaan Perpres 13/2018 diantaranya:
 - a. Terlaksananya sosialisasi di lingkungan perusahaan ekstraktif
 - b. Terlaksananya sosialisasi di 4 kota (Banjarmasin, Medan, Surabaya, Bali) tentang tata cara pendaftaran BO
11. Terkait dengan publikasi data BO. Secretariat EITI berencana untuk mempublikasikan data BO yang telah dikumpulkan pada bulan desember 2019.

12. Inti dari Renaksi BO OGI adalah membuat database BO dari seluruh korporasi yang terintegrasi. Untuk membuat data terintegrasi dibutuhkan peran insitusi lainnya, seperti EITI dan ESDM yang telah memiliki data BO dapat memberikan hak akses bagi Kumham untuk mengintegrasikan datanya. Begitu pula dengan data BO Kumham juga harapannya dapat digunakan oleh Kementerian/ Lembaga lainnya.
13. Renaksi OGI bersifat lebih umum dari Stranas PK, sehingga Aksi Stranas PK dapat dapat diintegrasikan dan menjadikan capaian yang lebih spesifik.
14. Terkait dengan penanggung jawab dan Kementerian/ Lembaga terkait, kedepannya perlu didetailkan lagi peran dari masing-masingnya. Jika ada kementerian yang tidak berperan secara langsung dapat dihapuskan tetapi ketika ada rapat-rapat tentang BO dapat diundang juga.
15. Tindaklanjut hasil pertemuan, perlu dilakukan koordinasi dengan Sekretariat Stranas PK untuk mendiskusikan aksi BO ini. Selanjutnya harapannya ada integrasi antara aksi-aksi lain terkait dengan BO agar menjadi satu. Proses integrasi ini dapat melibatkan tim dari renaksi lainnya
16. Selain itu, secara teknis pelaporannya nanti akan dibuka juga sistem pemantauan untuk tim OGI agar dapat mengakses laporan progress implementasi Stranas PK.

Notula Rapat

Tities Eka A.

Ringkasan Hasil Pembahasan Usulan Aksi

Aksi : Implementasi Data Kepemilikan Manfaat (*Beneficial Ownership*) yang terintegrasi dan dapat diakses oleh publik.

Latar Belakang:

Keterbukaan informasi terkait kepemilikan manfaat dari sebuah perusahaan yang dapat di akses oleh publik merupakan hal penting untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Namun, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Publish What You Pay Indonesia (2016) masih banyak pengusaha yang tidak membuka informasi kepemilikan manfaat dari sebuah bisnis yang ia miliki, bahkan melakukan penghindaran pajak berganda (tax avoidance). Hal tersebut menjadi faktor utama hilangnya potensi penerimaan negara.

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Implementasi Data Kepemilikan Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) yang terintegrasi dan dapat diakses oleh publik.	1. Terimplementasikannya Perpres 13/2018 (sosialisasi, tersedianya peraturan turunan dan integrasi data BO)	1. Terlaksananya sosialisasi tata cara pendaftaran BO di 4 kota (Banjarmasin, Medan, Surabaya, Bali) 2. Tersedianya draft Permen Tata Cara Pendaftaran Koperasi, tersedianya Permen Tata Cara Pendaftaran CV, Firma, penyampaian BO oleh PIC korporasi 3. Tersedia permenkumham tentang sistem pelayanan administrasi korporasi 4. Pengintegrasian data BO ke Kementerian Hukum dan HAM (menunggu konfirmasi dari kemenko perekonomian-EITI dan ESDM)	Kementerian Hukum dan HAM	1. Bappenas 2. Kemenkumham 3. PPATK 4. Kemkenkeu 5. Kemenko Perekonomian 6. KPK 7. Kementerian ESDM
	2. Terpublikasinya data BO untuk sektor ekstraktif (minerba dan migas)	3. Terlaksananya ujicoba pelaporan BO untuk 112 perusahaan minerba dan 69 perusahaan migas 4. Tersedianya data BO perusahaan perusahaan sektor ekstraktif yang siap untuk diakses publik	Sekretariat EITI	